

**PRODUK HUKUM PADA SEKTOR USAHA  
INDUSTRI KIMIA DASAR  
DAN  
PENERAPAN KOMUNIKASI HUKUM DALAM  
MEMPEROLEH PRODUK HUKUM**

**Oleh:  
YEHUDA  
217181015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**


Nama : Yehuda  
NIM : 217181015  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

**PRODUK HUKUM PADA SEKTOR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR  
DAN  
PENERAPAN KOMUNIKASI HUKUM DALAM MEMPEROLEH  
PRODUK HUKUM**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 21 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.

Jakarta, 24 Juli 2020  
Pembimbing,  
  
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI**

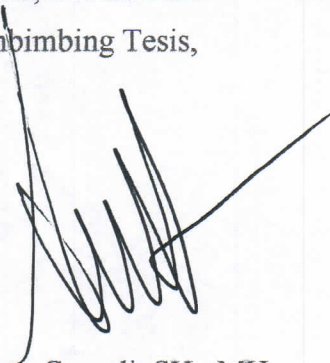
Nama Peserta : Yehuda  
N.I.M : 217181015  
Program Studi : Magister Kenotariatan

**JUDUL TESIS :**

**PRODUK HUKUM PADA SEKTOR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR  
DAN  
PENERAPAN KOMUNIKASI HUKUM DALAM MEMPEROLEH PRODUK HUKUM**

Jakarta, 24 Juli 2020

Pembimbing Tesis,



Dr. Ariawan Gunadi, SH., MH.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Yehuda  
NIM : 217181015  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

**PRODUK HUKUM PADA SEKTOR USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR  
DAN  
PENERAPAN KOMUNIKASI HUKUM DALAM MEMPEROLEH  
PRODUK HUKUM**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 22 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.

Jakarta, 24 Juli 2020  
Pembimbing,

  
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Manfaat Akademis .....	5
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Landasan Teori .....	5
1. Teori Hukum Positif .....	6
2. Teori Hukum Utilitarian .....	14
3. Teori Komunikasi Hukum dan Hukum Komunikasi .....	19
F. Model Kerangka Konseptual Penelitian .....	24
G. Metode Penelitian .....	25
H. Jenis Penelitian .....	26
I. Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian .....	27
J. Sumber Pengumpulan Data .....	28

K. Riset Kepustakaan .....	29
L. Penelitian Lapangan.....	29
M. Narasumber Penelitian.....	33
N. Teknik Pengolahan Data.....	33
O. Teknis Analisis Data.....	34
P. Sistematika Penulisan.....	36

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pelaku Usaha .....	38
B. Produk Hukum .....	42
C. Strategi Komunikasi Hukum .....	52
D. Industri Kimia Dasar .....	59

## **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

A. Produk Hukum Yang Terkait dengan Industri Kimia Dasar di Indonesia .....	64
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 .....	64
2. Realitas Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	70
3. Judicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) .....	69
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi.....	86

5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu.....	90
<b>B. Penerapan Komunikasi Hukum Perusahaan dalam Memperoleh Produk Hukum.....</b>	<b>92</b>
1. Penciptaan Komunikasi Hukum melalui Fungsi <i>Public Relations</i> (PR/Humas).....	92
2. Penciptaan Komunikasi Hukum melalui Citra Perusahaan .....	97
3. Penciptaan Komunikasi Hukum Dengan Pemerintah melalui Kegiatan CSR .....	100
4. Penciptaan Komunikasi Hukum dengan Pemerintah Melalui Kegiatan Kemitraan Kepada Masyarakat .....	122
5. Penciptaan Komunikasi Hukum Dengan Pemerintah Melalui Kontak Pribadi .....	125
6. Wawancara Terhadap Direksi Perusahaan Terhadap Produk Hukum Sektor Gas Bumi .....	126

**BAB IV ANALISIS PRODUK HUKUM YANG DIPERLUKAN OLEH  
PELAKU USAHA INDUSTRI KIMIA DASAR DAN PENERAPAN  
HUKUM KOMUNIKASI DALAM MEMPEROLEH PRODUK  
HUKUM**

A. Analisis Produk Hukum Yang Diperoleh Oleh PT XYZ Untuk Mendukung Industri Kimia Dasar .....	129
1. Analisis Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi .....	137
2. Analisis Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu .....	140
B. Analisis Komunikasi Hukum yang diterapkan untuk mendapatkan Produk Hukum .....	136
1. Analisis Komunikasi Hukum Perusahaan Dengan Pemerintah Pusat Melalui Fungsi <i>Public Relation</i> .....	142
2. Analisis Komunikasi Hukum Perusahaan Dengan Pemerintah Melalui Pembentukan Citra Perusahaan .....	145
3. Analisis Komunikasi Hukum Dengan Pemerintah Melalui Melalui Kegiatan CSR .....	148
4. Analisis Komunikasi Hukum Dengan Pemerintahan Melalui Komunikasi Resmi .....	150
5. Analisis Komunikasi Hukum Dengan Pemerintahan Melalui Kegiatan Kemitraan .....	152
6. Analisis Komunikasi Hukum Dengan Pemerintahan Melalui Kontak Pribadi .....	153



**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan..... 155

Saran ..... 156

**DAFTAR PUSTAKA.....158**

**LAMPIRAN.....163**

## ABSTRAK

Seiring adanya dukungan Pemerintah untuk pengembangan industri dalam negeri, hal ini secara langsung mempengaruhi perkembangan dunia industri di Indonesia yang semakin maju dan beragam.

Hal yang menarik terkait perkembangan industri di Indonesia adalah bahwa perkembangan industri di Indonesia bukan hanya terkait dengan sistem produksi, pemasaran, sumber daya manusia, atau inovasi, namun bagaimana pelaku usaha mendapatkan fasilitas dan kebijakan dari Pemerintah yang memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, fasilitas dan kebijakan dari Pemerintah adalah bagaimana pelaku usaha mendapatkan pasokan bahan bakar atau tidak, mendapatkan pasokan bahan baku atau tidak, dan jika mendapatkan, apakah harga yang diberikan menarik atau tidak, jumlah yang diberikan cukup atau tidak.

Pelaku usaha industri kimia dasar yang bahan baku utamanya adalah gas bumi memiliki keunikan tersendiri untuk mendapatkan bahan bakunya, dimana harga gas bumi dan jumlah gas bumi yang diperoleh harus ditetapkan oleh Pemerintah melalui Produk Hukum Pemerintah, yakni berupa Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri dari departemen terkait.

Hal penting lainnya adalah bagaimana pelaku usaha sektor industri kimia dasar mampu melakukan Komunikasi Hukum dengan Pemerintah guna mendapatkan Produk Hukum Pemerintah yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnisnya.

Pada Tesis ini, Penulis menganalisis Produk Hukum di sektor Gas Bumi dan Industri serta melakukan studi kasus pada Perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar untuk dapat mengetahui Produk Hukum apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana pelaku usaha sektor industri kimia dasar melakukan Komunikasi Hukum dengan Pemerintah guna mendapatkan Produk Hukum yang diperlukan tersebut.

Kata Kunci: Produk Hukum, Komunikasi Hukum